



**PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN DESA WISATA**

***STRATEGIC PLANNING OF DIY PROVINCE TOURISM DEPARTMENT FOR  
TOURISM VILLAGE MANAGEMENT***

Abel Agnidita<sup>1</sup>, Lena Satlita<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 31-01-23

Diperbaiki 13-02-23

Disetujui 23-02-23

Kata Kunci:

Perencanaan Strategis,  
Pengelolaan Desa Wisata,  
Pandemi COVID-19

Keywords:

Strategic Planning, Tourism  
Village Management,  
COVID-19

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam mengelola desa wisata pasca pandemi COVID-19 dan faktor pendukung serta faktor penghambat yang ada dalam perencanaan strategis tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pemilihan subjek informan melalui *purposive sampling* dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam mengelola desa wisata pasca pandemi COVID-19, terbagi dalam 7 tahap dan menghasilkan strategi SO. Strategi SO merupakan strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang. Strategi tersebut berupa kolaborasi dan inovasi digital. Selain itu juga terdapat faktor pendukung berupa kolaborasi antar desa wisata, kemitraan dengan perguruan tinggi dan sosialisasi serta faktor penghambat yang berupa belum disiplinnya masyarakat terhadap protokol dan lesunya antusiasme masyarakat terhadap pengelolaan desa wisata.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the strategic planning carried out by the DIY Province Tourism Department in managing tourism villages after the COVID-19 and the supporting and inhibiting factors in this strategic planning. This research uses descriptive qualitative research with the selection of informant subjects through *purposive sampling* and is analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the strategic planning carried out by the DIY Province Tourism Department in managing tourism villages after the COVID-19 pandemic, is divided into 7 stages and produces an SO strategy. SO strategy is a strategy that maximizes strengths and opportunities. The strategy is in the form of collaboration and digital innovation. Apart from that, there are also supporting factors in the form of collaboration between tourist villages, partnerships with universities and outreach as well as inhibiting factors in the form of the lack of discipline of the community towards the protocol and the lack of enthusiasm of the community for the management of tourist villages.

## 1. Pendahuluan

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki bisa diberdayakan untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Selain itu, perkembangan kepariwisataan nasional tersebut juga mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membuka peluang usaha jasa pariwisata dan peluang kerja bagi masyarakat (dpr.go.id). Pada tahun 2019 kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional mencapai 4,8% dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 13 juta orang (bankdata.kememparekraf.go.id). Tetapi pada tahun 2020, terjadilah pandemi COVID-19 yang berakibat terhadap kegiatan pariwisata terutama pada aspek kunjungan wisatawan. Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya 3,62 juta (Januari-September 2020) yang berarti jumlah tersebut hanya 22% dari jumlah wisatawan di periode yang sama pada tahun 2019. Menurunnya jumlah wisatawan mancanegara berdampak pada penurunan tingkat penghunian kamar hotel (okupansi) yang pada bulan Januari 2020 masih ada di tingkat rerata normal yaitu sekitar 49,17% dan 49,22% tetapi kemudian menurun di bulan Maret 2020 yaitu sebesar 32,24% dan yang paling hancur terjadi pada bulan April 2020 yaitu 12,67%. Daerah yang mengalami kehilangan okupansi terbesar di Indonesia adalah Provinsi Bali yaitu ada pada angka 16,62%. (bankdata.kememparekraf.go.id). Tak hanya penurunan saja, tetapi juga terjadi perubahan orientasi wisata di masyarakat dari *massal tourism* menjadi *small tourism* dan *healthy first*. Salah satu jenis wisata yang relevan dengan perubahan tersebut adalah desa wisata. Desa wisata menyuguhkan pengalaman autentik dari nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga mereka bisa mencoba secara langsung produk wisata yang ditawarkan oleh desa wisata tersebut. Selama pandemi COVID-19 (2020-2022), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa terdapat peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata dengan presentase angka 30%-50% terutama pada daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat (travel.kompas.com).

Sebagai salah satu daerah unggulan wisata, Provinsi DIY juga mengalami kerugian. Jumlah wisatawan baik dari mancanegara maupun nusantara dari tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan dengan persentase pertumbuhan yang dinamis dan puncaknya adalah pada saat tahun 2020 yang persentase pertumbuhan justru mengalami penurunan yaitu sampai pada angka 71,78%. Tahun 2020, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor pariwisata dengan rincian yang berasal dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Pemda DIY sebanyak Rp 285.748.213.791 dan mengalami penurunan sebesar 52,9% apabila dibandingkan dengan jumlah PAD dari sub sektor pariwisata di tahun 2019 yang mencapai Rp 606.468.910.587 (Dinas Pariwisata DIY, 2021:98). Pada saat kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara pada bulan April dan Mei baik pada hotel bintang maupun hotel non bintang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Angka okupansi yang biasanya bisa mencapai angka 49%, DIY hanya ada di angka 30,45% (bankdata.kememparekraf.go.id).

Sesuai dengan tujuan dinas untuk memulihkan ekonomi masyarakat, maka desa wisata menjadi pilihan wisata yang berkembang di kondisi pandemi COVID-19. Hal tersebut bisa diamati dari meningkatnya jumlah desa wisata yang mulai beroperasi yaitu dari 148 (2021) menjadi 205 (Agustus 2022). Tak hanya itu saja, ada beberapa prestasi yang didapatkan yaitu dinobatkan sebagai salah satu desa wisata berkelanjutan atau menang pada penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Kondisi tersebut tercipta karena adanya kepercayaan yang timbul dari wisatawan terhadap desa wisata yang memiliki prioritas terhadap aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh sertifikat CHSE. Selain itu, desa wisata juga sejalan dengan arah pembangunan pariwisata Provinsi DIY yang berkelanjutan terarah pada penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta berlandaskan pada kearifan lokal (Setyawati, dkk. 2022). Desa wisata juga masuk sebagai kriteria dalam pengembangan Desa Mandiri Budaya, yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi desa serta menurunkan kemiskinan dan pengangguran, bersama dengan desa budaya, desa preneur dan desa prima, sebagai salah satu dari 11 program strategis Gubernur DIY ([ildikti5.kemendikbud.go.id](http://ildikti5.kemendikbud.go.id)).

Adanya perubahan serta dampak yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19, perlu direspon dengan penyesuaian yang tepat sasaran untuk meminimalisir kerugian. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY yang merubah rencana strategis dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut disusun sebagai dasar bagi perencanaan program dan kegiatan pada sisa periode renstra di tahun 2020-2022 yang juga didasarkan pada renstra yang ada di masing-masing dinas kabupaten dan kota di Provinsi DIY. Perencanaan strategi tersebut juga bertujuan untuk membantu organisasi dalam berpikir secara strategis, mengembangkan strategis yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, memperbaiki kinerja organisasi, serta menyelesaikan masalah organisasi secara lebih efektif dan efisien (Bryson. 2016). Perencanaan selalu diawali dengan tahap penjabaran terkait visi misi dinas dan evaluasi program kerja di tiap bagian untuk membuat perencanaan baru yang dituangkan dalam berbagai bentuk dokumen berlandaskan pada Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) (Setyawati, dkk. 2022). Bagi desa wisata perencanaan strategis juga melibatkan forum komunikasi dari masing-masing desa wisata di kabupaten agar sesuai dengan kebutuhan. Meskipun permasalahan yang dihadapi oleh dinas di kabupaten/kota dan provinsi sama, tetapi berdasarkan hasil telaah renstra ternyata masih ada beberapa hal terkait pengembangan dan pembangunan kepariwisataan berbasis kawasan di wilayah DIY yang belum sinergi antar dinas kabupaten/kota dan provinsi sehingga menimbulkan perbedaan skala prioritas. Pada salah satu penelitian dengan judul Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis dalam Pengembangan Pariwisata (Rahmayani, dkk. 2021) dituliskan bahwa kondisi pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis belum optimal pasca memisahkan diri menjadi daerah otonom baru. Perlu adanya perencanaan strategis yang akan menghasilkan strategi untuk merespon perubahan yang terjadi agar pengembangan pariwisata bisa berjalan secara efektif dan sinergi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis terkait dengan perencanaan strategis yang dilakukan oleh dinas

pariwisata terhadap desa wisata terutama pada kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perubahan. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan strategis milik Bryson. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam mengelola desa wisata pasca pandemi COVID-19 dan faktor pendukung serta faktor penghambat yang ada dalam perencanaan strategis tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam melakukan pengelolaan desa wisata pada masa pandemi COVID-19. Proses dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa tahap yaitu mempersiapkan dan mengajukan pertanyaan pada informan, mengumpulkan data berdasarkan pada pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan dan menganalisisnya serta yang terakhir menafsirkannya sesuai dengan teori dan data di lapangan menjadi sebuah laporan akhir.

### **2.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan September 2022 dan November 2022. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi DIY yang berlokasi di Jalan Raya Janti No 4, Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198.

### **2.3. Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah para *stakeholder* di Dinas Pariwisata Provinsi DIY yang terlibat dalam kegiatan perencanaan strategis terhadap pengelolaan desa wisata. Berdasarkan kriteria tersebut subjek dalam penelitian ini adalah Subkoordinator Kelembagaan Pariwisata dan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.

### **2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

#### **1. Teknik wawancara atau *interview***

Teknik wawancara atau *interview* digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin mendapatkan data secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait dengan kajian penelitian secara lebih terbuka dan memungkinkan munculnya pertanyaan lain diluar dari pedoman pertanyaan yang sudah disusun sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih lengkap. Wawancara dilakukan bersama subkoordinator kelembagaan pariwisata dengan tema desa wisata secara umum dan perencanaan strategisnya serta penyusun program anggaran dan pelaporan dengan tema anggaran pada masa pandemi COVID-19

## 2. Dokumentasi

Dokumen dalam sebuah penelitian bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:240). Penggunaan dokumen sebagai sumber data bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari proses wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profil Dinas Pariwisata DIY, laporan statistik kunjungan wisatawan dan laporan program kegiatan serta keuangan selama masa pandemi COVID-19 terutama pada bidang desa wisata

Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dibantu oleh pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan catatan penelitian, alat perekam dan kamera sebagai perangkat yang membantu proses pelaksanaan penelitian.

### 2.5. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber karena peneliti ingin mendapatkan data dari berbagai sumber yang ada di lapangan dan menggunakan subjek penelitian sebagai pengecek kebenaran data. Penggunaan triangulasi sumber bertujuan untuk mengklarifikasi data yang didapatkan dari subjek penelitian terkait dengan perencanaan strategis bagi Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam melaksanakan perencanaan strategis dalam pengelolaan desa wisata terutama pada masa pandemi COVID-19

### 2.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman (1984) yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah jenuh. Berikut beberapa langkah analisis data menurut Miles and Huberman (1984) yang dikutip menurut Sugiyono:

1. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting lalu dicari tema dan juga polanya sehingga hasil dari reduksi data tersebut bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. Peneliti melaksanakan reduksi data secara berkelanjutan sampai proses penelitian selesai
2. Penyajian data (*display data*) dilaksanakan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Tahap penyajian data akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data akan diawali dengan menuliskan deskripsi hasil penelitian terkait dengan pariwisata, desa wisata selama pandemi COVID-19 yang dilanjutkan dengan perencanaan strategis oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam melaksanakan strategi untuk mengelola desa wisata dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan.
3. Penarikan kesimpulan mengarah pada proses deskriptif yang berfokus pada jawaban terhadap rumusan masalah sehingga penelitian ini memiliki kesimpulan yang terkait dengan tahapan perencanaan strategis oleh Dinas

Pariwisata Provinsi DIY dalam pengelolaan desa wisata beserta dengan faktor pendukung dan penghambatnya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Provinsi DIY terhadap Pengelolaan Desa Wisata

##### 1. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan atau pembentuk opini internal tentang seluruh upaya perencanaan strategis beserta langkah perencanaannya dan menghimpun komitmen baik dari pihak internal maupun eksternal. Dinas Pariwisata Provinsi DIY memiliki kepala dinas sebagai pimpinan organisasi yang bertanggung jawab terhadap gubernur. Dalam melaksanakan tugas perencanaan tersebut, beliau akan dibantu oleh bagian-bagian yang ada di dalam struktur organisasi dinas dan apabila diakumulasikan secara keseluruhan, kepala dinas juga akan berhubungan dengan pihak eksternal seperti legislatif (DPRD), Bappeda, forum dan juga organisasi wisata lainnya bersama dengan bawahannya sesuai dengan bidang atau programnya masing-masing. Pada program desa wisata, bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata menjadi penanggung jawabnya. Mereka berkoordinasi dengan pengelola desa wisata baik yang dikelola secara mandiri atau yang dikelola di bawah kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan juga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Berkaitan dengan tahap ini, bidang kapasitas menyatakan bahwa selain berfokus pada desa wisata dan pokdarwis, mereka juga berfokus pada pelatihan dan sertifikasi oleh seksi SDM yang berkerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesional (LSP) yang juga berlaku bagi para pengelola desa wisata terutama pada bagian pengelolaan *homestay*.

Proses pada tahap ini berkaitan dengan kegiatan forum komunikasi yang dilakukan bersama dengan para pengelola desa wisata. Setelah merencanakan bersama dengan dinas melalui rencana strategis yang karena adanya pandemi COVID-19 mengalami perubahan, program/strategi tersebut lalu disosialisasikan melalui media forum komunikasi. Perencanaan strategis terhadap pengelolaan desa wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata juga menyinggung tentang pengadaan penyesuaian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kalurahan (RIPAKAL) yang diperkuat dengan peraturan kalurahan atau peraturan desa agar kegiatan pariwisata bisa terarah dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang. Kesepakatan yang telah disetujui dalam tahap awal perencanaan strategis akan memudahkan bagi dinas pariwisata dan *stakeholder* lainnya dalam menentukan strategi terhadap potensi desa wisata agar maksimal dalam pengelolaannya.

##### 2. Mengidentifikasi mandat organisasi

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas sifat dan makna dari mandat yang “dipaksakan” secara eksternal baik secara formal maupun informal. Mandat formal merupakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi yang

tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan, piagam, pasal-pasal ataupun perjanjian-perjanjian yang mengikat dalam surat keputusan ([kesbangpol.riau.go.id](http://kesbangpol.riau.go.id)). Mandat formal yang diberikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi DIY, tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja. Sedangkan untuk mandat informal merupakan norma-norma yang menjadi pegangan beroperasinya organisasi yang juga memiliki sifat mengikat. Mandat informal yang diberikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi DIY tercantum dalam kebijakan nasional serta visi misi pembangunan prioritas pemda DIY yang mengarah pada keterlibatan Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam meningkatkan pembangunan pariwisata yang salah satu fokusnya adalah menjadikan pariwisata di Provinsi DIY sebagai tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Keberadaan mandat organisasi menjadi dasar bagi pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah yang pelaksanaannya tertuang dalam Rencana Kerja (renja). Keberadaan renja menjadi acuan bagi seluruh unit kerja Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam menyusun renja di unit kerja masing-masing, sebagai implementasi terperinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi DIY. Selain itu, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh dinas, yang sudah tercantum baik dalam mandat formal maupun mandat informal, juga mewajibkan dinas untuk memberikan aksi berupa bantuan pada desa wisata pada saat terjadi pandemi COVID-19. Identifikasi mandat organisasi dalam perencanaan strategis membantu dinas untuk membagi tugas dan fungsinya baik antar bagian yang ada di internal dinas maupun dengan pihak eksternal sehingga tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai.

### 3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Tahap ini dilakukan untuk menetapkan tujuan organisasi maupun filosofi dan nilai yang menjadi panduan organisasi. Tak hanya itu, penetapan misi dan nilai juga akan membantu dalam pembagian tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh dinas. Adanya misi dipengaruhi oleh terbentuknya suatu visi yang mewakili identitas suatu organisasi. Visi yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY adalah “Terwujudnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan”. Sedangkan untuk misi dinas yang menjadi manifestasi dari visi tersebut adalah (a) Mewujudkan destinasi pariwisata DIY yang berbasis budaya, lingkungan, kreatif dan inovatif, maju berkembang dan mampu menggerakkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan (b) Mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi seluruh masyarakat DIY untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

melalui sektor kepariwisataan. misi yang ada di dinas juga tertuang dalam misi milik Provinsi DIY pada poin pertama yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing dan juga poin kedua yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan”. Keterkaitan keduanya berhubungan dengan upaya pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Provinsi DIY terutama dalam rangka untuk memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Hal ini juga membantu dalam mencapai tujuan bersama untuk pariwisata DIY yang direncanakan menjadi yang terbaik se-Asia Tenggara. Hal tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan DIY yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025, sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

#### 4. Menilai lingkungan eksternal

Analisis terhadap lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan juga ancaman dari suatu organisasi. Faktor-faktor dalam lingkungan eksternal berpengaruh terhadap perencanaan strategis karena pariwisata merupakan faktor yang cukup sensitif terhadap isu publik maupun bencana alam. Seperti saat pandemi COVID-19, pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak sehingga perlu dilakukan perubahan serta adaptasi terhadap pelaksanaannya. Faktor eksternal menjadi bagian dari pertimbangan dalam perencanaan strategis agar faktor eksternal seperti politik (adanya UU/kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19), ekonomi (menurunnya jumlah PDRB), sosial (perubahan orientasi wisata di kalangan masyarakat dari *mass tourism* menjadi *small tourism*) dan teknologi (aplikasi Visiting Jogja) bisa membantu perencanaan. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya, faktor eksternal ini juga menimbulkan ancaman bagi perencanaan apabila dinas tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Berikut ini peluang dan ancaman yang timbul sebagai akibat dari faktor-faktor dalam lingkungan eksternal:

##### a. Peluang

- 1) Terbukanya akses kolaborasi dengan semua *stakeholder* termasuk pihak pemerintah daerah
- 2) Terciptanya inovasi baru yang dituangkan melalui peluncuran aplikasi Visiting Jogja
- 3) Perkembangan ekonomi masyarakat dan kesempatan menyalurkan kreativitas yang juga didukung dengan perkembangan digitalisasi.

##### b. Ancaman

- 1) Terbentuknya *cluster* baru COVID-19 di lokasi desa wisata dan sekitarnya



- 2) Memungkinkan terjadinya selisih pendapat antara pengelola desa wisata dengan pemerintah setempat
  - 3) Timbulnya keresahan masyarakat yang bisa mengganggu kinerja dalam mengelola desa wisata yang juga berdampak pada perekonomian masyarakat.
5. Menilai lingkungan internal
- Analisis terhadap lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari suatu organisasi. Faktor-faktor dalam lingkungan internal berpengaruh terhadap perencanaan strategis karena akar dari pelaksanaan perencanaan strategis timbul dari internal dinas bersama dengan pengelola desa wisata. Faktor internal tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya dana/anggaran, kelembagaan/struktur organisasi, dan sarana prasarana. Hal itu terjadi sebagai respon terhadap adanya perubahan atau kebutuhan akan perkembangan desa wisata sehingga bisa sejalan dengan tujuan dinas pariwisata dan Provinsi DIY. Pemanfaatan terhadap faktor internal menjadi fondasi bagi tindakan perencanaan strategis dinas agar mampu menentukan strategi bagi desa wisata terutama pasca pandemi COVID-19. Berikut ini kekuatan dan kelemahan yang timbul sebagai akibat dari faktor-faktor dalam lingkungan internal:
- a. Kekuatan
    - 1) Adanya legalitas hukum yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata
    - 2) Adanya bantuan keuangan
    - 3) Adanya kekayaan budaya sebagai keunikan desa wisata di Provinsi DIY.
  - b. Kelemahan
    - 1) Kurangnya jumlah sumber daya manusia di pihak dinas
    - 2) Masalah regenerasi pada pengelolaan desa wisata
    - 3) Potensi desa wisata belum ditingkatkan secara maksimal
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
- Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi. Dalam proses menentukan isu tersebut, organisasi harus mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT diawali dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang ada dalam perusahaan dengan menggunakan IFAS dan EFAS yang kemudian penghitungan tersebut dimasukkan dalam diagram analisis SWOT. Angka yang tertera dalam penghitungan tersebut ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kondisi yang dihadapi organisasi melalui wawancara dan melihat dokumentasi data pendukung.

Tabel 1. Penghitungan IFAS Perencanaan Strategis terhadap Pengelolaan Desa Wisata

No	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1	Legalitas hukum	0.1875	4	0.75
2	Bantuan keuangan	0.1875	4	0.75
3	Kekayaan budaya	0.15625	4	0.625

	Total			2.125
<b>No</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Skor</b>
1	Kurang SDM	0.1875	1.5	0.28125
2	Kurang regenerasi	0.15625	2	0.3125
3	Potensi deswi belum maksimal	0.125	2.5	0.3125
	Total			0.90625
Sumbu X: Kekuatan-Kelemahan: 2.125-0.90625 = 1.21875				

Sumber: Data Peneliti, 2022

Tabel 2. Penghitungan EFAS Perencanaan Strategis terhadap Pengelolaan Desa Wisata

No	Peluang	Bobot	Rating	Skor
1	Kolaborasi antar <i>stakeholder</i>	0.1875	4	0.75
2	Pengadaan aplikasi penunjang	0.1875	4	0.75
3	Perkembangan ekonomi rakyat	0.125	3	0.375
	Total			1.875
No	Ancaman	Bobot	Rating	Skor
1	Cluster baru COVID-19	0.1875	1	0.1875
2	Selisih pendapat antar <i>stakeholder</i>	0.15625	2	0.3125
3	Keresahan masyarakat	0.15625	2	0.3125
	Total			0.8125
Sumbu Y: Peluang-Ancaman: 1.875-0.8125 = 1.0625				

Sumber: Data Peneliti, 2022

Setelah melalui tahap penghitungan, faktor-faktor tersebut dianalisis dalam matriks analisis SWOT kualitatif untuk mengetahui strategi dari masing-masing kotak yang terbentuk. Dalam matriks analisis SWOT kualitatif, strategi yang ditentukan masih sangat umum dan terbuka bagi semua peluang strategi percampuran dari SWOT itu sendiri. Berikut strategi yang terbentuk dengan menggunakan matriks analisis SWOT kualitatif:

Tabel 3. Hasil Matriks SWOT Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Strategi Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya legalitas hukum yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata</li> <li>Bantuan keuangan dari pihak kementerian</li> <li>Kekayaan budaya sebagai keunikan utama desa wisata di Provinsi DIY</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya jumlah sumber daya manusia/pegawai pada dinas</li> <li>Kurangnya regenerasi pada pengelolaan desa wisata</li> <li>Potensi desa wisata belum ditingkatkan secara maksimal</li> </ol>

<b>Faktor Strategi Eksternal</b>		
<b>Peluang</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya kolaborasi antar desa wisata dengan pihak eksternal</li> <li>2. Pengadaan aplikasi penunjang layanan sebagai respon terhadap pengembangan teknologi</li> <li>3. Perkembangan ekonomi masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan desa wisata</li> <li>2. Meningkatkan inovasi bersama dengan kolaborator bisa berupa aplikasi atau website penunjang layanan pada desa wisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan terutama bagi generasi muda</li> <li>2. Mengadakan forum diskusi bersama dengan kolaborator terkait dengan kebutuhan desa wisata dan masyarakat sekitar</li> </ol>
<b>Ancaman</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya cluster baru COVID-19 di lokasi desa wisata dan sekitarnya</li> <li>2. Timbulnya selisih pendapat antara pengelola desa wisata dengan pemerintah setempat</li> <li>3. Timbulnya keresahan dari masyarakat terhadap kondisi desa wisata akibat pandemi COVID-19 (vakum 2 tahun) yang bisa mengganggu kinerja pengelolaan desa wisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan protokol kesehatan yang diawasi dengan ketat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Ditetapkannya peraturan terkait dengan pengelolaan desa wisata beserta dengan pengelolaan anggarannya agar tidak terjadi perdebatan di masa depan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan jumlah tenaga bantuan pada dinas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Pengadaan pelatihan bagi sumber daya manusia yang dijadwalkan secara efektif dan efisien</li> </ol>

Sumber: Data Peneliti, 2022

Isu strategis memainkan peran utama sebagai pilihan kebijakan pokok yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu isu strategis sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi secara keseluruhan seperti bagaimana visi misi yang dibangunnya, nilai-nilai organisasi, mandat organisasi dan faktor eksternal internal yang kemudian digunakan sebagai dasar analisis. Pada deskripsi data dijelaskan bahwa analisis terhadap faktor eksternal dan faktor internal tersebut menggunakan analisis SWOT kualitatif. Identifikasi tersrbut menggunakan pendekatan secara langsung karena visi misi, nilai, serta mandat sudah dianalisis terlebih dahulu. Dalam analisis tersebut, akan muncul 4 kolom kemungkinan strategi yang bisa terjadi sebagai akibat dari adanya faktor eksternal dan faktor internal tersebut. Kolom tersebut adalah SO, ST, WO, dan WT. Dari masing-masing kolom kemungkinan strategis tersebut ada beberapa hal yang terjadi yang melatarbelakangi pengambilan strategi bagi

dinas. Hasil akhir dari strategi akan diputuskan dengan menggunakan analisis SWOT kuantitatif pada tahap selanjutnya.

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui jenis strategi apakah yang digunakan oleh organisasi untuk mengatasi isu-isu yang terjadi dalam organisasi. Pada penelitian ini, penentuan strategi secara umum telah dilakukan dengan menggunakan matriks analisis SWOT kualitatif dan untuk menentukan strategi secara lebih spesifik akan digunakan matriks analisis SWOT kuantitatif yang penghitungannya sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Berdasarkan pada penghitungan tersebut maka didapatkan nilai internal yaitu 1.22 dan nilai eksternal yaitu 1.07. Nilai internal tersebut akan diinterpretasikan sebagai nilai sumbu x, sedangkan untuk nilai eksternal akan diinterpretasikan sebagai nilai sumbu y. Setelah diletakkan sesuai dengan nilai internal (sumbu x) dan nilai eksternal (sumbu y), maka perpotongan angka tersebut (1.22,1.07) terletak di kuadran 1 yang artinya Dinas Pariwisata Provinsi DIY perlu mendukung strategi agresif dalam proses reaktivasi desa wisata terutama pada kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum terlihat kapan berakhirnya. Strategi tersebut masuk ke dalam strategi SO atau strategi yang membuat organisasi berada di posisi yang kuat untuk memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada. Strategi SO terdiri dari meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan desa wisata serta meningkatkan inovasi bersama dengan kolaborator baik berupa aplikasi maupun website penunjang layanan desa wisata. Pada strategi meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan desa wisata, terdapat program forkom yang dilakukan dinas bersama dengan masyarakat desa wisata dan para ahli yang terkait dengan tema forkom di daerah tersebut. Tema forkom ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat desa terhadap pengelolaan desa wisata dan dilaksanakan di 4 kabupaten. Sedangkan pada strategi meningkatkan inovasi bersama dengan kolaborator, terwujud secara umum yaitu pada aplikasi Visiting Jogja yang sangat membantu wisatawan untuk mengetahui informasi tentang pariwisata DIY serta pembayarannya juga bisa langsung digunakan pada aplikasi tersebut yang mana berkolaborasi dengan Bank BPD DIY.

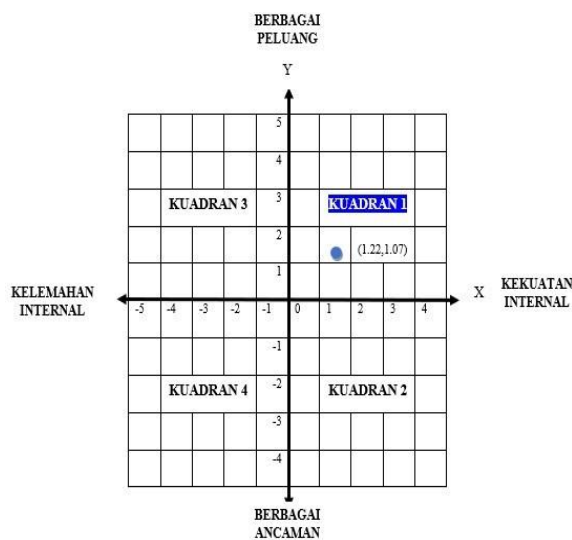


Diagram 1. Diagram Cartesius Penghitungan Analisis SWOT Kuantitatif

Strategi ditentukan berdasarkan pada pernyataan visi misi, mandat, analisis SWOT, isu strategis serta strategi alternatif praktis lainnya. Dalam tahapan tersebut faktor anggaran serta penempatan staff atau sumber daya manusia pada perencanaan strategis yang dilakukan oleh dinas juga menjadi bagian dari strategi. Keduanya sudah tercantum dalam faktor internal dinas. Penetapan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT secara kuantitatif yang dihitung berdasarkan skor angka yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Setelah angka tersebut dihitung kemudian muncullah hasil terakhir yang dimasukkan dalam diagram analisis SWOT kuantitatif untuk mengetahui letak strategi yang dihasilkan oleh dinas pariwisata melalui tahapan dalam perencanaan strategis.

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Tahap ini mengarah pada visi keberhasilan yang merupakan deskripsi mengenai bagaimana tampak dari organisasi tersebut apabila berhasil mengimplementasikan perencanaan strategis. Di beberapa organisasi, penyusunan visi organisasi atau visi keberhasilan tidak dilakukan karena terkadang perencanaan mengalami perubahan sehingga hasil yang diharapkan bisa saja meleset. Pada dinas pariwisata, penentuan visi bersama dengan misi dan juga nilai organisasi yang mengarah pada pelayanan publik, karena dinas merupakan salah satu organisasi publik yang berwenang atas urusan pariwisata.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Provinsi DIY terhadap Pengelolaan Desa Wisata**

Keberadaan faktor pendukung dan penghambat diakibatkan oleh adanya kondisi pandemi COVID-19 yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan strategis. Pandemi COVID-19 menimbulkan banyak perubahan yang menyebabkan wisata harus mengalami adaptasi. Berikut ini penjelasan faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan strategis Dinas Pariwisata Provinsi DIY terhadap Pengelolaan Desa Wisata:

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Terbentuknya kolaborasi antar desa**

Kolaborasi tersebut bisa terbentuk apabila desa wisata benar-benar berada di tingkat desa yang mencakup semua dusun. Antar dusun tersebut nantinya bisa saling bekerjasama untuk menyajikan keunikan destinasi wisata di wilayah tempat desa wisata berada. Kolaborasi ini menjadi penting bagi proses perencanaan strategis karena akan berkaitan dengan jenis wisata apa yang akan ditawarkan, promosi seperti apakah yang akan digunakan untuk pemasaran produk maupun jasa wisata serta evaluasi dan pengawasan yang bisa dilakukan. Selain itu, urusan administrasi yang terkait dengan anggaran bisa masuk dalam penyesuaian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kalurahan (RIPAKAL).

##### **b. Terjalinnnya kemitraan bersama dengan perguruan tinggi**

Kemitraan tersebut bertujuan bagi pengembangan desa wisata terutama bagi desa wisata yang baru saja mendapatkan penghargaan terbaik di lomba desa wisata dan di ADWI 2022. Perguruan tinggi memberikan pelatihan dan feedback terkait dengan kegiatan pengelolaan desa wisata. Kegiatan ini membahas tentang potensi yang ada dalam desa wisata dan langkah apa yang bisa diambil oleh pengelola untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah identitas dan ciri khas tak hanya bagi desa wisata saja tetapi juga wilayah tempat desa wisata tersebut berada. Selain itu, perguruan tinggi juga mendapatkan keuntungan dengan kemitraan ini yaitu pada bagian pengabdian masyarakat. Salah satu kegiatan yang telah berjalan adalah bersama dengan Universitas Sanata Dharma.

##### **c. Sosialisasi dan forum komunikasi**

Sosialisasi CHSE desa wisata dan forkom lintas sektor berlokasi di desa wisata yang ada di kabupaten. Pelaksanaan sosialisasi dan forum komunikasi ini bertujuan untuk mendengarkan dan berdiskusi langsung dengan masyarakat desa wisata terkait dengan kebutuhan desa wisata. Selain itu, keluhan serta ide yang timbul dari masyarakat juga ditampung untuk nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi dinas dan para ahli dalam mengambil kebijakan. Kegiatan forkom tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam satu tahun karena adanya limitasi anggaran. Dalam setiap pelaksanaan forkom, tema yang dibahas akan berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa wisata. Dari 4 kegiatan forkom tersebut, pelaksanaan baru terjadi sebanyak 3 kali yaitu di Kabupaten Bantul yang pelaksanaan forkomnya berada di

Desa Wisata Wukirsari dengan pembahasan terkait DMB, Kabupaten Sleman yang pelaksanaan forkomnya berada di Desa Wisata Tanjung dengan pembahasan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk homestay sebagai salah satu usaha jasa pariwisata dan Kabupaten Kulon Progo yang pelaksanaan forkomnya berada di Desa Wisata Purwosari dengan pembahasan terkait promosi pemasaran homestay.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Masyarakat belum disiplin protokol kesehatan

Setelah masa PPKM resmi dilonggarkan, pariwisata menjadi salah satu sektor yang langsung aktif kembali. Reaktivasi terhadap pariwisata ini juga didukung dengan adanya sertifikasi CHSE untuk memastikan masyarakat agar bisa berwisata secara aman dan nyaman. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat masih banyak belum disiplin pada protokol kesehatan dan juga belum melakukan vaksinasi karena adanya mitos yang mempengaruhi mereka.

### b. Lesunya antusiasme masyarakat terhadap pengelolaan desa wisata akibat pandemi COVID-19

Kelesuan yang dihadapi oleh masyarakat berpengaruh terhadap perencanaan strategis karena kebutuhan akan perkembangan desa wisata tergantung pada bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka desa wisata hanya akan jalan di tempat dan potensi yang ada tidak akan pernah bisa optimal sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Belum lagi tentang keluhan masyarakat terkait dengan pelatihan terdahulu yang memakan waktu cukup lama, padahal kepengurusan untuk pokdarwis dan desa wisata dilakukan secara sukarela, sehingga para pengurus juga memiliki pekerjaan lain disamping mengelola desa wisata.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, terdapat 7 tahapan perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY yaitu memrakasai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis, mengidentifikasi mandat organisasi, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan eksternal, menilai lingkungan internal, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, dan merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Hasil dari tahapan perencanaan di atas yaitu strategi SO. Strategi SO tersebut berfokus pada memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh dinas pariwisata yaitu pada titik kolaborasi dan inovasi. Dalam pelaksanaan perencanaan strategis terdapat faktor pendukung yaitu kolaborasi antar desa wisata, kemitraan bersama dengan perguruan tinggi dan sosialisasi serta forum komunikasi. Sedangkan, faktor penghambat dari perencanaan strategis tersebut adalah masyarakat yang belum disiplin terhadap protokol kesehatan dan lesunya antusiasme masyarakat terhadap pengelolaan desa wisata akibat dari pandemi COVID-19.

## Saran

Kemitraan yang dilakukan oleh desa wisata bisa lebih memaksimalkan potensi desa wisata apabila tidak hanya terbuka bagi sesama industri pariwisata saja tetapi juga di luar pariwisata. Industri lain yang cocok untuk dikembangkan bersama dengan desa wisata contohnya adalah industri kuliner, industri kerajinan, atau industri permainan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Terbukanya kemitraan bersama pihak lain di luar pariwisata akan menambah keragaman kegiatan serta pengalaman menarik yang bisa diakses wisatawan saat berkunjung ke suatu desa wisata. Hal ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga harapan desa wisata untuk swadaya dan membantu mengurangi pengangguran bisa pelan-pelan terwujud. Tak hanya itu saja, peluang digitalisasi di desa wisata dengan penggunaan aplikasi ataupun website juga sebaiknya ditingkatkan. Apabila website atau bahkan bisa saja aplikasi bagi masing-masing desa wisata yang ada di Provinsi DIY dikembangkan lalu disambungkan dengan website atau aplikasi pusat maka wisatawan bisa lebih mudah untuk mengetahui kondisi desa wisata yang akan dikunjungi. Selain membantu dalam akses informasi, website atau aplikasi juga membantu proses promosi bagi masing-masing desa wisata.

## Referensi

- [1] Bryson, John M. (2016). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. (Terjemahan M.Miftahuddin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [2] DPR RI. 2019. *Pariwisata Berikan Kontribusi pada Pendapatan Negara*. Diakses pada 5 Januari 2023 dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24852/t/Pariwisata+Berikan+Kontribusi+pada+Pendapatan+Negara>
- [3] Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif. 2020. *Outlook Pariwisata & Ekonomi Kreatif*. Diakses pada 5 Januari 2023 dari [https://bankdata.kemenparekraf.go.id/upload/document\\_satker/a6d2d69c8056a29657be2b5ac3107797.pdf](https://bankdata.kemenparekraf.go.id/upload/document_satker/a6d2d69c8056a29657be2b5ac3107797.pdf)
- [4] Rahmayani, Iis, Sinta Ningrum dan Dedi Sukarno. (2021). *Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis dalam Pengembangan Pariwisata*. Jurnal Administrasi Negara (JANE), 12(2)
- [5] Ramadhian, Nabilla. 2021. Berapa Jumlah Desa Wisata di Indonesia? Diakses pada 5 Januari 2023 dari <https://travel.kompas.com/read/2021/08/01/180600927/berapa-jumlah-desa-wisata-di-indonesia-?page=all>
- [6] Setyawati, Niken dan Yuli Setyowati. (2022) *Peran Dinas Pariwisata DIY dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Journal of Community Empowerment (JCOMENT), 3(2)
- [7] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [8] Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 2021. *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Desa Mandiri Budaya*. Diakses pada 5 Januari 2023 dari <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat-melalui-desa-mandiri-budaya>